

IMPLEMENTASI PROGRAM MITIGASI BENCANA MELALUI SEKOLAH SIAGA BENCANA DI SD NEGERI BALUWARTI, KOTAGEDE, YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF DISASTER MITIGATION PROGRAM THROUGH DISASTER PREPAREDNESS SCHOOL IN BALUWARTI ELEMENTARY SCHOOL, KOTAGEDE, YOGYAKARTA

Warda Apriyanti

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

warda.apriyanti@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD N Baluwarti. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD N Baluwarti. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini antara lain Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti dengan dibantu pedoman wawancara dan pedoman observasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD N Baluwarti telah memenuhi empat parameter SSB, ialah parameter sikap dan tindakan, parameter perencanaan dan kesiapsiagaan, parameter kebijakan sekolah, dan parameter mobilisasi sumberdaya; (2) Faktor pendukung dalam implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana adalah kemampuan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga (BPBD, PMI, Puskesmas, TNI dan Polri), struktur bangunan yang tahan gempa, memiliki perangkat pendukung untuk mengimplementasikan program mitigasi bencana.; Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana adalah tidak semua guru mendukung kebijakan mitigasi bencana, kekurangan dana dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, tidak semua materi dapat diintegrasikan dengan SSB, kurangnya komunikasi dengan lembaga terkait.

Kata kunci: *Program mitigasi bencana, Sekolah Siaga Bencana*

Abstract

This research aims to describe: (1) the implementation of disaster mitigation programme through disaster preparedness school in Baluwarti Elementary School. (2) supporting factors and inhibitors of disaster mitigation programme through disaster preparedness school in Baluwarti Elementary School. This research was a descriptive research with qualitative approach. Subjects in this research were Principal, Teachers, and Students. Data was obtained by interview, observation, and documentation. The main instrument in this research was researcher with assisted by interview guides and observation guidelines. Techniques used in data analysis were data collection, data reduction, data display, and conclusion. Validity used source triangulation and technique triangulation. The results of this research was show that: (1) Implementation of disaster mitigation programme through disaster preparedness school in Baluwarti Elementary School meet the four parameters of the SSB, is the parameter of the attitude and action, planning and preparedness, parameter parameter parameter, and the school policy on mobilization of resources; (2) Supporting factors in the implementation of disaster mitigation programs through the school disaster preparedness is the ability to establish cooperation with the institutions (BPBD, PMI, clinics, TNI and Polri), earthquake resistant structures, have a device to support implementing disaster mitigation programmes.; While the barrier factors in the implementation of disaster mitigation programs through this disaster preparedness school not all teachers support disaster mitigation policies, the lack of funds in the implementation of disaster mitigation activities, not all material can be integrated with SSB, the lack of communication with relevant agencies.

Keywords: *Disaster mitigation program, Disaster Preparedness School*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis memungkinkan Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam yang beragam dan budaya. Kondisi ini memunculkan risiko bencana mulai dari bencana alam letusan gunung berapi, banjir, longsor, gempa bumi, hingga masalah kesehatan. Berbagai bencana terjadi, dalam jangka waktu panjang dapat memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-MDGs*) 2015, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian delapan indikator MDGs sebagai tolak ukur derajat kesejahteraan suatu bangsa. Indonesia berada di daerah rawan gempa bumi dikarenakan terletak diantara tiga lempeng aktif di dunia yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.

Menurut sejarah gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) frekuensi yang terjadi tidak terlalu sering, jika dibandingkan dengan kota-kota pesisir barat Pulau Sumatera atau Indonesia bagian timur. Wilayah DIY telah terjadi gempa bumi sebanyak empat kali dengan kekuatan yang menimbulkan dampak tidak sedikit. Gempa bumi pertama kali terjadi pada tahun 1867 yang berdampak pada korban luka-luka dan korban meninggal yang cukup banyak serta rusaknya bangunan yang cukup luas. Pada tahun 1943 terjadi kembali gempa bumi dengan kekuatan antara 8-9 MMI (*Modified Mercalli Intensity* atau getaran yang dirasakan orang) yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 213 orang dan 2800 rumah hancur dan 2.096 orang luka-luka. Pada tahun 1981 terjadi lagi gempa bumi di wilayah DIY dan sekitarnya meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan yang parah. Gempa bumi besar terakhir adalah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.55 WIB yang menelan korban jiwa lebih dari 5800 jiwa dan ribuan rumah hancur (Bambang Marwanta, 2007:28)

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 mengenai “Penanggulangan Bencana” yang mengatur tahapan dalam bencana meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Adanya Undang-Undang ini juga menjadi landasan pendirian BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di seluruh kabupaten di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) yang dievaluasi secara berkala serta mengadopsi, melaksanakan, dan mengembangkan kesepakatan global ke dalam konteks lokal. Upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam hal mitigasi bencana telah menjadi perhatian pemerintah di setiap tingkatan, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, simulasi, seminar, pengembangan program di masyarakat, serta memperkuat kualitas institusi Pemerintah di bidang kebencanaan antara lain BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanahkan dalam pasal 8 ayat b bahwa, “setiap orang berhak mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mengatasi mitigasi bencana, salah satunya melalui bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan di Indonesia

umumnya diterapkan pada tiga bentuk yang dikenal dengan bentuk formal, nonformal, dan informal. Dimana bentuk pendidikan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan sekolah siaga bencana merupakan salah satu bagian penting dalam upaya dalam mitigasi bencana sejak dini. Pedoman umum tentang mitigasi bencana juga sudah tertuang di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2006.

Pada pendidikan formal, sekolah siaga bencana sudah menjadi salah satu agenda dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui kampanye sekolah aman dan juga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Surat Edaran No 70a /SE/MPN/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengarusutamaan Risiko Bencana di sekolah. Dalam surat edaran ini Mendiknas menghimbau kepada para Gubernur, Walikota, dan Bupati di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di Sekolah melalui 3 hal yaitu: 1) Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan warga sekolah; 2) Pengintegrasian mitigasi bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik

| No. | Nama Sekolah | Keterangan |
|-----|-----------------|----------------------|
| 1 | SD N Umbulharjo | Launching Tahun 2014 |
| 2 | SD Bangunrejo 1 | Launching Tahun 2015 |
| 3 | SD Bangunrejo 2 | Launching Tahun 2015 |
| 4 | SD N Baluwarti | Launching Tahun 2016 |

intra maupun ekstra kurikuler; 3) Membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah. Namun, karena tidak adanya kelanjutan penegasan melalui produk kebijakan yang mengikat maka himbauan tersebut menjadi tidak diimplementasikan secara serius oleh

daerah. Daerah hanya akan menerapkan jika ada intervensi dari lembaga/ instansi luar. Sekolah merupakan lembaga formal penyelenggara pendidikan yang bertugas untuk membangun kecerdasan generasi muda. Keberadaan sekolah siaga bencana ini sangat bermanfaat bagi warga sekolah dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kesiapsiagaan sekolah juga dapat meningkatkan rasa aman bagi warga sekolah khususnya siswa yang merupakan bagian dari hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Pendidikan di dalam sekolah diberikan kepada anak untuk membekali mereka berupa modal yang bermanfaat di masa depan. Seorang anak di sekolah mendapatkan kegiatan pembelajaran atau transfer ilmu, ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan pasti didalamnya akan muncul berbagai problematika masalah. Maka dari itu, dicetuskan suatu kebijakan yang dalam hal ini diterapkan pada sekolah siaga bencana. Sekolah Siaga Bencana adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengupayakan implementasi mitigasi bencana. Dalam menerapkan program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana ini BPBD DIY bekerjasama dengan pihak terkait sudah melaunching 4 sekolah siaga bencana di wilayah Kota Yogyakarta, sebagai upaya mitigasi bencana pada masing-masing sekolah tersebut yang diharapkan warga sekolah menjadi panutan bagi masyarakat sekitar untuk dapat merealisasikan Indonesia tanggap darurat bencana. Berikut adalah data sekolah siaga bencana di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Sekolah Siaga Bencana di Kota Yogyakarta

(sumber: dokumen BPBD DIY)

Informasi yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY pada pra penelitian di SD N Baluwarti merupakan sekolah yang rawan gempa. Salah satu yang melaksanakan program mitigasi bencana melalui sekolah siaga

bencana di wilayah Kota Yogyakarta adalah SD Negeri Baluwarti. SD Negeri Baluwarti memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Sekolah Siaga Bencana (SSB) dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Melalui program ini diharapkan mampu untuk membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah dan membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah.

SD Negeri Baluwarti merupakan salah satu Sekolah Siaga Bencana yang diresmikan sejak 6 April 2016 di wilayah kota Yogyakarta dengan potensi bencana gempa bumi yang kemudian dibentuk dan dikembangkan atas kerjasama BPBD DIY, BPBD Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Pemerintah Kelurahan dan Lingkungan serta lembaga Swadaya Masyarakat khususnya YP2SU. Kota Yogyakarta adalah salah satu daerah yang tinggi potensi risiko kebencanaan berupa angin puting beliung, gempa bumi, banjir, dan epidemi demam berdarah. Menurut masyarakat sekitar, bahwa pada saat gempa bumi tahun 2006 gedung SD N Baluwarti ini hancur rata dengan tanah, maka dari itu pemerintah dan masyarakat setempat bersama-sama membangun kembali SD N Baluwarti dengan bangunan yang tahan gempa.

Fasilitas dan capaian yang telah dicapai oleh SD Negeri Baluwarti menjadi bukti sekolah tersebut memiliki nilai lebih, namun di satu sisi ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, yakni keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan program serta persoalan keterbatasan kemampuan guru atau penyelenggara sekolah atas pengetahuan kesiapsiagaan. Pelatihan yang diperoleh masih dirasakan belum dapat menjadi dasar untuk penerapan yang lebih kontinyu. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam mendapatkan pendidikan atau pelatihan lebih lanjut. Selain dalam mata pelajaran wajib,

pendidikan kesiapsiagaan untuk mengatasi mitigasi bencana juga diintegrasikan ke dalam materi pelajaran ekstrakurikuler seperti Pramuka. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Mitigasi bencana melalui Sekolah Siaga Bencana di SD Negeri Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta” untuk mendeskripsikan tentang implementasi program tersebut dan mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat terlaksananya program. Penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi sekolah-sekolah lain dalam menerapkan sekolah siaga bencana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang “Implementasi Program Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Siaga Bencana di SD N Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta”.

Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini antara lain; (1) Kepala sekolah dapat memberikan informasi atau data terkait dengan implementasi program mitigasi bencana karena kepala sekolah adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan program; (2) Guru, dapat memberikan informasi mengenai implementasi program mitigasi bencana dan proses, metode serta hasil pembelajarannya yang sudah diterapkan di sekolah; (3) Peserta didik, untuk mengetahui data tentang implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD N Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta yang berlokasi di Basen Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta. Penelitian ini

dilaksanakan pada Februari 2018 sampai Juli 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi

Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian dibantu dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana

Implementasi berkenaan dengan upaya melaksanakan keputusan kebijakan (Tilaar dan Nugroho, 2008:215). Dengan adanya suatu keputusan kebijakan maka sebuah program dapat dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Suatu implementasi program tidak akan berjalan dengan baik apabila implementasi tersebut tidak dijalankan. Maka dari itu, implementasi program harus dilaksanakan dan di jalankan agar dapat berjalan dengan baik.

Van Meter dan Van Horn (dalam Sudiyono, 2007:80) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh Negara, pemerintah, swasta, kelompok maupun individu dalam rangka mencapai tujuan (umum dan khusus) yang menjadi prioritas

dalam keputusan kebijakan. Salah satu produk kebijakan yang dirumuskan pejabat/intansi pemerintah adalah Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang merupakan dasar dari adanya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Daerah No 10 tahun 2010 tentang tata kerja dan organisasi BPBD di DIY. Sedangkan realisasi pada lingkup pendidikan adalah dengan dibentuknya Sekolah Siaga Bencana (SSB) pada tahun 2013 yang berlandaskan pada Peraturan Kepala BNPB No 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Mengingat SDN Baluwarti terletak pada daerah rawan bencana gempa bumi maka sangat tepat kebijakan SSB ini diimplementasikan untuk membangun kesadaran bencana dan kesiapsiagaan.

SD N Baluwarti Kotagede merupakan salah satu sekolah yang memiliki program mitigasi bencana. Untuk mengukur ketercapaian tujuan dari implementasi program SSB yang dilakukakn sekolah dalam membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB) perlu ditetapkan parameter dan indikator berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana.

Sikap dan tindakan program mitigasi bencana di SD Negeri Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta

Sikap dan tindakan dalam Sekolah Siaga Bencana adalah persepsi pengetahuan dan kemampuan dari komponen sekolah untuk mengatasi bahaya bencana secara efektif. Sekolah Siaga Bencana ini membangun kemampuan seluruh warga sekolah, baik individu maupun warga sekolah secara kolektif untuk menghadapi bencana secara cepat dan tepat guna. Dengan demikian, seluruh warga sekolah menjadi target sasaran, tidak hanya murid.

Perwujudan parameter sikap dan tindakan SSB dilaksanakan dengan:

Pengetahuan mengenai bencana di lingkungan sekolah dan sekitarnya, pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, pelaksanaan simulasi di sekolah, keterampilan seluruh komponen sekolah untuk menjalankan rencana tanggap darurat pada saat simulasi, dan sosialisasi berkelanjutan di sekolah.

SD N Baluwarti adalah salah satu SSB di Kota Yogyakarta yang menerapkan Sekolah Siaga Bencana. Parameter sikap dan tindakan SD N Baluwarti adalah pengetahuan mengenai bencana yang sudah diterapkan dengan dimasukkan ke dalam mata pelajaran dan non akademik di sekolah. Sosialisasi dan simulasi adalah salah satu bentuk dari parameter sikap dan tindakan sebagai Sekolah Siaga Bencana. Sosialisasi SD N Baluwarti terkait SSB dilaksanakan dengan berbagai bentuk, diantaranya dengan sosialisasi dengan wali murid setiap tahun ajaran baru sampai dengan pelatihan/ simulasi dengan warga sekitar dan pihak terkait. Pelaksanaan sosialisasi SSB haruslah didukung dengan keterampilan warga sekolah pada saat simulasi. Secara umum keterampilan SD N Baluwarti pada saat simulasi sudah terbilang cukup baik.

Secara keseluruhan indikator sikap dan tindakan yang ada di SD N Baluwarti sudah dilaksanakan dengan cukup baik dilihat dari beberapa guru sudah menintegrasikan materi sekolah siaga bencana di dalam kelas dan mengaplikasikannya dalam praktik.

Kebijakan sekolah program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD Negeri Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta

Kebijakan sekolah adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh sekolah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah, baik secara khusus maupun terpadu. Keputusan tersebut bersifat mengikat. Pada praktiknya, kebijakan sekolah akan landasan, panduan, arahan

pelaksanaan kegiatan terkait dengan mitigasi bencana di sekolah.

Parameter kebijakan SSB dilakukan dengan 3 (tiga) hal yakni: kebijakan sekolah, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah yang mendukung upaya mitigasi bencana, akses informasi pelaksanaan SSB, dan media informasi. Ketiga standar tersebut telah diterapkan dengan baik oleh SD N Baluwarti.

1) Memuat upaya mitigasi bencana

Upaya implementasi SSB dapat dilihat dari Visi, Misi, dan Tujuan sekolah. SD N Baluwarti mempunyai visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai berikut. Visi yang ingin dicapai di SD N Baluwarti yaitu: "Terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam berprestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa dan berwawasan lingkungan berdasarkan ketaqwaan dan ilmu pengetahuan". Visi ini digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. Sedangkan di dalam misi sekolah yakni: Memberi contoh bertutur kata yang ramah

- a) Bertingkah laku baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah
- b) Memberi tambahan waktu belajar untuk pendalaman materi Ujian Nasional
- c) Membimbing siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal
- d) Membimbing pelaksanaan ibadah sesuai agamanya secara rutin
- e) Membiasakan berdoa setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan di sekolah
- f) Mengenalkan sila-sila pada Pancasila dan menjelaskan secara ringkas kepada siswa dengan tingkat kepemahamannya
- g) Mengenalkan dan membiasakan bekerja secara bergotong royong
- h) Mengenalkan adat istiadat daerah lain kepada siswa
- i) Melaksanakan Program Sekolah Siaga Bencana kepada siswa
- j) Mengenalkan karakteristik gejala alam di lingkungannya
- k) Mengenalkan SEMUTLIS dan kerja bakti di lingkungan sekolah

Dengan adanya Visi dan Misi tersebut, sekolah berharap dapat mencapai pada tujuan SD Negeri Baluwarti yaitu “Mempersiapkan generasi bangsa handal yang mampu memberi manfaat bagi sesama dan lingkungannya”.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang sudah dapat diketahui bahwa visi, misi, dan tujuan SD N Baluwarti sudah memuat tentang upaya mitigasi bencana. Dilihat dari visi yang berbunyi “.....berwawasan lingkungan berdasarkan ketaqwaan dan ilmu pengetahuan”

Berwawasan lingkungan memiliki arti dalam konteks ini dapat mengenali gejala alam lingkungannya, dapat menjaga kelestarian lingkungannya, mampu menjaga kebersihan lingkungannya. Misi SD N Baluwarti juga sudah mengandung unsur-unsur tentang mitigasi bencana. Dapat dilihat dari point *i* yang berbunyi melaksanakan Program Sekolah Siaga Bencana kepada siswa.

2) Akses informasi pelaksanaan SSB di SD N Baluwarti

Informasi tentang mitigasi bencana merupakan syarat mutlak untuk membentuk budaya siaga bencana. Akses terhadap informasi mitigasi bencana adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam mitigasi bencana. SD N Baluwarti memiliki akses informasi mitigasi bencana gempa bumi cukup lengkap. Akses informasi dari BPBD terkait sekolah siaga bencana yakni tentang pembinaan warga sekolah melalui sosialisasi, simulasi, dan pemberian sarana dan prasarana yang mendukung.

3) Media informasi pelaksanaan sekolah siaga bencana di SD N Baluwarti

Media adalah aspek yang paling penting dalam penyampaian wawasan kebencanaan. Media di SD N Baluwarti salah satunya adalah guru. Guru merupakan media utama yang paling maksimal untuk menyalurkan informasi SSB. Guru sebagai ujung tombak di sekolah sudah baik dalam memasukkan materi SSB dalam mata pelajaran, selain itu guru juga sering memberikan informasi pengarahan kepada

siswa melalui pembelajaran seperti video, poster, simulasi, dan lain sebagainya. Poster dipasang di dinding sekolah yang bertemakan mitigasi bencana yang tersebar di beberapa titik sekolah. Media informasi lainnya adalah mading (majalah dinding), isi dari pada mading tidak hanya terkait mitigasi bencana melainkan berbagai informasi seperti koran, karya siswa, puisi, pantun, dan sebagainya.

Perencanaan kesiapsiagaan program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD Negeri Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta

Perencanaan kesiapsiagaan bertujuan untuk menjamin adanya tindakan cepat dan tepat guna pada saat terjadi bencana dengan memadukan dan mempertimbangkan sistem penanggulangan bencana di daerah dan disesuaikan kondisi wilayah setempat. Bentuk atau produk dari perencanaan ini adalah dokumen-dokumen, seperti protap kesiapsiagaan, rencana aksi, dan dokumen pendukung kesiapsiagaan terkait, termasuk sistem peringatan dini, peta evakuasi dengan tanda dan rambu. Parameter perencanaan kesiapsiagaan terdapat enam point utama yang dapat dijadikan dasar dalam menerapkan SSB di sekolah, sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana
Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah.
- 2) Tersedianya rencana aksi sekolah dalam mitigasi bencana
Rencana aksi sekolah dalam konteks ini adalah rencana aksi yang dilaksanakan SD N Baluwarti adalah dengan menjalankan apa yang sudah dilatihkan berdasarkan panduan untuk melaksanakan evakuasi dan prosedur dalam menghadapi bencana.
- 3) Tersedianya sistem peringatan dini dan evakuasi
Sistem peringatan dini haruslah dipahami oleh seluruh komponen

sekolah. Sistem peringatan dini yang sehari-hari diterapkan yaitu menggunakan HT (*Handy Talkie*) yang berada di ruang kepala sekolah. Selain peringatan dini, tindakan yang harus dilakukan adalah evakuasi. Jalur evakuasi di SD N Baluwarti sudah tertata secara sistematis dan sudah tersedia dalam peta jalur evakuasi. Secara keseluruhan sistem peringatan dini dan evakuasi SD N Baluwarti sudah dilaksanakan dengan baik.

- 4) Adanya peta evakuasi
Peta evakuasi dengan tanda dan rambu yang terpasang dan mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah adalah hal mutlak yang harus dimiliki SSB. SD N Baluwarti memiliki tanda dan rambu evakuasi yang sudah baik. Tanda dan rambu evakuasi terpasang di berbagai sudut sekolah guna memudahkan warga sekolah untuk menuju titik yang sudah ditentukan (titik kumpul)
- 5) Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi
Secara teknis lokasi evakuasi masih kurang memenuhi standar, karena akses jalan yang padat dengan pemukiman warga, lokasi evakuasi yang kurang luas dan kurang dipahami.
- 6) Adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah yang disepakati
Prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah adalah segi pengadaan dan penyimpanan dokumen penting. Prosedur tetap kesiapsiagaan di SD N Baluwarti kurang dilaksanakan dengan baik, adapun prosedur tetap kesiapsiagaan yaitu, SD N Baluwarti telah memiliki arsip dokumen penting, namun arsip dokumen itu dipinjam oleh sekolah lain dan belum dikembalikan. Sedangkan untuk nomor penitng, SD N Baluwarti juga memiliki nomor penting seperti, Puskesmas, Pemadam kebakaran, PMI, TNI/Polri, serta aparat terkait.

Parameter perencanaan kesiapsiagaan di SD N Baluwarti masih

kurang melaksanakan semua indikator prosedur tetap kesiapsiagaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa akses terhadap informasi bahaya bencana dapat dilakukan dengan membuat peta evakuasi, jalur evakuasi, kesepakatan lokasi evakuasi, protap kesiapsiagaan, pengadaan dan penyimpanan dokumen penting. Namun, perlu adanya sistem peringatan dini agar lebih mudah diakses siswa saat terjadi bencana, misalnya sirine atau kentongan.

Mobilisasi sumberdaya program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD Negeri Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta

Sekolah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana sekolah. Mobilisasi sumber daya didasarkan pada kemampuan sekolah dan pemangku sekolah. Mobilisasi ini juga terbuka bagi peluang partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya. Mobilisasi sumberdaya dalam standar SSB yaitu:

- 1) Adanya bangunan sekolah yang aman terhadap bencana
- 2) Jumlah dan jenis perlengkapan, suplai dan kebutuhan dasar pasca bencana mencukupi.
- 3) Adanya gugus siaga bencana sekolah
- 4) Adanya kerjasama diantara gugus guru terkait upaya mitigasi bencana
- 5) Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah secara rutin

Mobilisasi sumber daya pertama struktur bangunan. Bangunan di SD N Baluwarti sudah memiliki struktur bangunan yang tahan gempa bumi. Tata ruang, jalur evakuasi, tempat parkir dan adanya pintu darurat yang tertata sesuai standar BPBD mencerminkan bahwa sekolah tersebut sudah memiliki bangunan yang aman terhadap bencana. Mobilisasi sumber daya berikutnya adalah sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki masih terbatas diantaranya, tandu, tenda, kotak P3K.

Gugus siaga bencana adalah aspek yang paling penting dalam mobilisasi sumberdaya. SD N Baluwarti memiliki satu gugus siaga bencana yakni pramuka. Kegiatan mitigasi bencana di pramuka adalah mengajarkan tentang bagaimana pertolongan pertama, cara mengantisipasi sebelum bencana, tindakan menyelamatkan diri saat bencana sampai dengan memperagakan alat mitigasi bencana seperti mendirikan tenda.

Bangunan tahan bencana, peralatan yang memadai, dan gugus siaga bencana tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kerjasama dari pihak dalam ataupun pihak luar sekolah terkait mitigasi bencana. Dari berbagai bentuk kerjasama, simulasi merupakan bentuk kerjasama yang paling baik dalam membentuk budaya siaga bencana, dikarenakan simulasi bencana tidak hanya 1 (satu) pihak melainkan banyak pihak seperti PMI, Puskesmas, dan BPBD setempat yang menerapkan secara langsung di lapangan akan memudahkan peserta simulasi paham yang harus dilakukan saat bencana. Mobilisasi terakhir adalah pemantauan dan evaluasi program. Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan pihak sekolah dengan BPBD dan pemerintah terkait. Dengan pemantauan tersebut dapat dikatakan kurang efektif. Maka dari itu, perlu adanya *monitoring* dan evaluasi lebih lanjut agar pelaksanaan program mitigasi bencana dapat berjalan dengan maksimal.

Secara keseluruhan ke tujuh program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik di SD N Baluwarti. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mobilisasi sumber daya di sekolah sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Pertama adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas. Kedua adalah simulasi bencana yang hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Keempat parameter di atas adalah perangkat pengukuran kesiapsiagaan bencana di sekolah. Dalam pengukuran, masing-masing parameter itu tidak berdiri

sendiri, melainkan saling terkait satu sama lainnya. Dari ukuran yang didapat dari sekolah terkait, dapat diketahui mengenai tingkat ketahanan sekolah terhadap ancaman bencana tertentu, misalnya SD Baluwarti terancam bencana gempa bumi, kebakaran. Dalam praktiknya, kesiapsiagaan sekolah juga dipadukan dengan upaya kesiapsiagaan aparat pemerintah dan masyarakat di daerah atau lingkungan terdekat sekolah.

Faktor pendukung dan faktor penghambat

Faktor pendukung

Pertama, adanya kerjasama dengan lembaga di luar sekolah menjadikan implementasi mitigasi bencana melalui program sekolah siaga bencana dapat berjalan dengan baik. Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga atau pihak terkait seperti BPBD, Dinas Pendidikan, Puskesmas, Polsek, dan sebagainya. *Kedua*, struktur desain bangunan yang tahan gempa. *Ketiga*, SD N Baluwarti memiliki perangkat pendukung seperti alat komunikasi *reapeter*, rambu-rambu jalur evakuasi, dll dalam pelaksanaan program mitigasi bencana.

Faktor penghambat

Pertama, tidak semua guru mendukung kebijakan mitigasi bencana, karena bimbingan dari pihak terkait masih kurang. *Kedua*, kekurangan dana dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana. *Ketiga*, tidak semua materi dapat diintegrasikan dengan SSB. *Keempat*, sekolah kurang menjalin komunikasi secara intensif dengan lembaga atau pihak terkait seperti BPBD, Dinas Pendidikan, dll sehingga sekolah kurang mendapatkan informasi terkait perkembangan yang sedang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat SSB ini seperti halnya yang dijelaskan di atas menyebabkan program mitigasi bencana di SD N Baluwarti belum berjalan maksimal. Dengan demikian

program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana masih perlu dimaksimalkan lagi mengingat masih ada banyak faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti, Kotagede, Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana. Ketercapaian tujuan belum berjalan sesuai yang direncanakan hal tersebut dilihat dari indikator tujuan dari program mitigasi bencana sebagai berikut: (a) Sikap dan tindakan warga sekolah sudah paham terkait bencana dan cara menanggulangnya. Namun untuk menyebarluaskan informasi secara terlibat langsung di masyarakat sudah dilakukan namun belum berjalan secara maksimal. (b)Perencanaan kesiapsiagaan belum maksimal dibuktikan dengan dokumen penilaian risiko bencana sudah disusun, namun dipinjam oleh sekolah lain dan belum dikembalikan, kemudian sistem peringatan dini belum sesuai standart. (c) Kebijakan sekolah sudah dapat dipenuhi secara maksimal. Namun, untuk akses bagi seluruh warga sekolah perlu adanya penyebarluasan yang lebih agar warga sekolah semakin paham. (d) Dari mobilisasi sumberdaya dapat dikatakan cukup baik dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak terkait.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD N Baluwarti sebagai berikut: (a) Faktor pendukung yaitu kemampuan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti BPBD, PMI, Puskesmas, TNI dan Polri. Kedua,

struktur desain bangunan yang tahan gempa, serta memiliki perangkat pendukung untuk mengimplementasi program mitigasi bencana. (b) Faktor penghambat yaitu tidak semua guru mendukung kebijakan mitigasi bencana, tidak semua materi dapat diintegrasikan dengan SSB, serta kurang komunikasi dengan lembaga yang menyebabkan kebijakan mitigasi bencana di SD N Baluwarti belum berjalan maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak terkait implementasi program mitigasi bencana melalui sekolah siaga bencana di SD N Baluwarti, Kotagede:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan BPBD DIY, monitoring dan evaluasi program mitigasi bencana di sekolah-sekolah khususnya SD N Baluwarti agar lebih ditingkatkan kembali.
2. Bagi sekolah, sosialisasi program mitigasi bencana lebih ditingkatkan agar warga sekolah paham benar tentang maksud dan tujuan pendidikan mitigasi bencana yang diselenggarakan. Serta, arsip-arsip penting harus tetap dijaga sebagai bukti otentik dan sejarah sekolah.
3. Bagi guru, pelaksanaan program mitigasi bencana di SD N Baluwarti perlu dilakukan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan dan menyeluruh ke semua guru sehingga dapat meningkatkan pengetahuan guru di SD N Baluwarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika dan Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- _____. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta.: Laksbang Mediatama.
- Depdikbud. (2003). *Undang – Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ditjen Mendikdasmen. (2009). *Naskah Policy Paper Pengarusutaman Risiko Bencana*. Jakarta: Kemendikdasmen.
- H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai bahan kajian publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kemendiknas. (2010). *Surat Edaran Mendiknas No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah*. Jakarta
- Bambang Marwanta. (2007). Analisis Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006. *Jurnal Alami* (vol. 12 tahun 2007). Hal. 27-31
- Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8, Tahun 2010, tentang Penanggulangan Bencana*
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD DIY
- Peraturan Kerja BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang – Undang Nomor 24, Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana*.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim UNISDR Asia Pasifik. (2006). *Pengurangan Bencana di Asia dan Pacific edisi 2*. UNISDR
- UNDP. (2007). *Tinjauan Umum Manajemen Bencana, Modul Program Pelatihan Manajemen Bencana*. UNDP, Geneva.